

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 1994. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhad, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.
- Hartono, Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Hery. 2020. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Penyelesaian Sengkete*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mshnud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusuo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Shubhan, M. Hadi. 2019. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Situmorang, Victor M. dan hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sunggono, Bambang. 20018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pres.

Swantoro, Herri. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang kepailitan menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3739.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 28.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Jurnal

Aprita, Serlika. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit." *Samudra Keadilan*, No 1 Vol. XIV Januari-Juni 2019.

Dewi, Imma Indra. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdat Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman". *Mimbar Hukum*. No. 3 Vol. XX Oktobeer 2008.

Dirgantara, Pebry. "Debt Forgiveness Principle in Bussines Legal Representatives." *Notariil*, No. 1 Vol. IV Mei 2019.

Hisbullah, Rakhmat iwin, Farida Patittingi, dkk. "Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektifitas Pelayanan Publik". *Madani Legal Review*. No. 1 Vol. 2 Juni 2018.

Indah, Hetty Tri Kusuma. "Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan." *Hukum Uniski*, No. 1 Vol. IV Januari-Juni 2015.

Iskandar, Agus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Pranata Hukum*, No. 1 Vol. VII Januari 2012.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Al Adl*. No. 11 Th VI Januari-Juli 2014.

Purwaka, Tommy Hendra."Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum Yang Rasional". *Masalah-Masalah Hukum*. No. 2 Th XL April 2011.

Rahmawati, Rizka. "Comparison of Laws Settling Debt Remaining Bankruptcy Between Indonesian and Dutch Countries." *Notariil*, No. 1 Vol. VII Januari-April 2019.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*. No. 2 Vol VII Desember 2018.

Somppie, Evie. "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Debitor yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Privatum*, No. 2 Vol. II April 2014.

Soyendah Retnaningsih, Isis Ikhwansyah. "Legal Status of Individual Bankrupt Debtors After Termination of Bankruptcy and Rehabilitation Under

Indonesian Bankruptcy Law.” *Indonesian Law Review*, No. 1 Vol. VII Januari-April 2017.

Surjanto, Dina. “Urgensi Peraturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Hukum Kenotariatan*, No. 2 Vol. III Oktober 2018.

Takalo, Taufiq H. “Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit dalam Peradilan.” *Lex Privatum*, No. 1 Vol. V Januari-Februari 2017.

Karya Ilmiah

Arfian, Ilham. 2018. *Upaya Rehabilitasi Debitor Perseroan Terbatas yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan*. Surabaya: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Peneliti Universitas Airlangga.

HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan. 2017. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Diakses November 11, 2020. <https://bphn.go.id/>.

Pramudya, Ardhita. 2017. *Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia*. Surabaya: Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Talupoor, Kristina Litua. 2014. *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Jabatan Notaris*. Surabaya: Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Website

Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan. t.thn. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses Oktober 27, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara>.

Kurniawan, Aris. 2020. *Guru Pendidikan*. 27 September. Diakses Oktober 24, 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/>.

Setiawan, Parta. 2019. *Guru Pendidikan*. 11 September. Diakses September 18, 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>.

Pengadilan Negeri Surabaya. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Diakses Pada Januari 1, 2021. <https://sipp.pn-surabayakota.go.id/>

Pengadilan Negeri Medan. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Diakses Pada Januari 7, 2021. <http://sipp.pn-medankota.go.id/>

Pengadilan Negeri Makassar. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Diakses Pada Januari 11, 2021. <http://sipp.pn-makassar.go.id/>

Pengadilan Negeri Semarang. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. Diakses Pada Januari 25, 2021. <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>

Berita Negara Republik Indonesia. Data Pengumuman Dalam Berita Negara RI. Diakses pada Januari 1, 2021. <http://www.beritanegara.co.id/bntbn/>